

**AKAD SEWA BARANG PECAH BELAH DI DUSUN WIDORO
KANDANG LABAN, MOJOLABAN-SUKOHARJO DALAM
PERSPEKTIF FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL (DSN)**



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam

Oleh:

RISKA DWI JUMIYARSI

NIM: I000110010

NIRM:11/X/02.1.2/0240

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2020**

HALAMAN PERSETUJUAN

**AKAD SEWA BARANG PECAH BELAH DI DUSUN WIDORO KANDANG
LABAN, MOJOLABAN-SUKOHARJO DALAM PERSPEKTIF FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL (DSN)**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:


RISKA DWI JUMIYARSI

1 000 110 010

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Harun', written over a horizontal line. The signature is stylized with loops and a long horizontal stroke at the end.

Drs. Harun. MH.

NIK.343

HALAMAN PENGESAHAN

**AKAD SEWA BARANG PECAH BELAH DI DUSUN WIDORO KANDANG
LABAN, MOJOLABAN-SUKOHARJO DALAM PERSPEKTIF FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL (DSN)**

OLEH

RISKA DWI JUMIYARSI

I000110010

**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Sabtu, 17 November 2020
Dn dinyatakan telah memenuhi syarat**

Dewan Penguji:

1. **Drs. Harun, MH.**
(Ketua Dewan Penguji)
2. **Azhar Alam, S.E., Lc., M.SEI**
(Anggota I Dewan Penguji)
3. **Dr. Mu'inudinillah Basri, M.Ag.**
(Anggota II Dewan Penguji)

(.....)

(.....)

(.....)



Dekan,

Dr. Syamsul Hidayat, M.Ag

NIK. 606

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 16 Desember 2020

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Riska Dwi Jumiarsi' with a stylized flourish at the end.

RISKA DWI JUMIARSI
1000110010

**AKAD SEWA BARANG PECAH BELAH DI DUSUN WIDORO KANDANG
LABAN, MOJOLABAN-SUKOHARJO DALAM PERSPEKTIF FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL (DSN)**

Abstrak

Skripsi ini merupakan upaya untuk memaparkan mengenai akad sewa barang pecah belah di dusun Widoro Kandang Laban, Mojolaban-Sukoharjo. Penelitian ini menarik untuk dilakukan karena dalam akad sewa barang pecah belah tersebut tidak hanya mengedepankan untuk mendapat keuntungan, tetapi masih mengedepankan nilai kekeluargaan dan sikap saling tolong-menolong dalam masyarakat, sehingga dalam sistem penentuan biaya sewanya kadang terdapat perbedaan harga sewa. Perbedaan tersebut biasanya terjadi antara warga dalam satu dusun dengan warga di lain dusun. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk Mendeskripsikan pelaksanaan sewa barang pecah belah di dusun Widoro Kandang, Laban, Kecamatan Mojolaban-Sukoharjo tersebut telah sesuai dengan peraturan akad sewa dalam fatwa Dewan Syariah Nasional atau belum. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dan data-datanya didapatkan menggunakan metode observasi, wawancara (*interview*) dan penelusuran dokumen. Metode analisis datanya dilakukan dengan dua cara, yaitu induktif dan deduktif. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan, *pertama*, akad sewa menyewa barang pecah belah di dusun Widoro Kandang telah memenuhi unsur-unsur sewa menyewa baik dari segi rukun maupun syarat yang sesuai dengan hukum syara', karena dalam pelaksanaan akad terjadi kesepakatan, jelas tempo sewanya dan kesepakatan harga. *Kedua*, tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) terhadap akad sewa menyewa barang pecah belah pada masyarakat dusun Widoro Kandang kelurahan Laban kecamatan Mojolaban kabupaten Sukoharjo ini sah, karena penyewa dan yang menyewakan barang saling sepakat dalam akad, jelas manfaat barang yang disewakan, tempo penyewaan dan biaya sewa dibayar sesuai kesepakatan.

Kata Kunci : akad sewa, fatwa dewan syariah nasional (DSN)

Abstract

This thesis is an attempt to describe the lease contract for glassware in the Widoro Kandang hamlet, Laban, Mojolaban-Sukoharjo. This research is interesting to do because in the glassware lease contract not only prioritizes profit, but still prioritizes family values and mutual help in society, so in the lease fee determination system sometimes there are difference in lease prices. This difference usually occurs between residents in one hamlet and residents in another hamlet.. The purpose of this research was to describe the implementation of the lease of glassware in the Widoro Kandang hamlet, Laban, Mojolaban-Sukoharjo whether it is in accordance with the lease contract regulations in the Fatwa of the National Sharia Board (DSN) or not. This research is a field research and the data are obtained using observation, interview methods and document searches. The data analysis method is carried out in two ways, namely inductive and deductive. Based on the research results, it can be

concluded. *First*, the lease contract for renting glassware in Widoro Kandang hamlet, Laban, Mojolaban-Sukoharjo has fulfilled the elements of leasing both in terms of harmony and conditions in accordance with shara law, because in the implemetation of the contract there is an agreement, it is clear the lease period and the agreement price. *Second*, the review of the Fatwa of the National Sharia Board (DSN) on the lease contract for renting glassware in the community of Widoro Kandang hamlet, Laban, Mojolaban-Sukoharjo is valid, because the tenants and those who rent out the goods agree on the agreement, it is clear the benefits of the items being rented and lease fees are paid according to contract.

Key words : lease contract, fatwa of the national sharia board (DSN)

1. PENDAHULUAN

Ijarah adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa.¹ Penelitian ini jenis transaksi *ijarahnya* adalah sewa menyewa barang. Dan obyek sewa dalam penelitian ini adalah penyewaan barang pecah belah. Barang pecah belah berarti barang-barang yang mudah pecah (misalnya piring, gelas, dan mangkuk). Penyewaan barang pecah belah yang menjadi fokus kajian adalah persewaan barang pecah belah di dusun Widoro Kandang Rt 02 Rw 04 Laban Mojolaban. Menurut pemaparan Bapak Memet Haryanto, selaku pengurus persewaan barang pecah belah di dusun Widoro Kandang.² Di dalam pelaksanaan sewa menyewa barang pecah belah di dusun Widoro Kandang tidak hanya mengedepankan untuk mendapat keuntungan, tetapi masih mengedepankan nilai kekeluargaan dan sikap saling tolong-menolong dalam masyarakat, sehingga dalam sistem penentuan biaya sewanya kadang terdapat perbedaan harga sewa. Perbedaan tersebut biasanya terjadi antara warga dalam satu dusun dengan warga di lain dusun.

Berdasarkan paparan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Akad Sewa Barang Pecah Belah di Dusun Widoro Kandang, Laban, Mojolaban-Sukoharjo Dalam Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional.

¹Abdul Ghafur Anshari, *Reksa Dana Syariah*. (Bandung: Refika Aditama, 2008), hal. 25.

²Hasil Wawancara dengan bapak Memet Haryanto pengurus persewaan barang pecah belah di dusun Widoro Kandangpada tanggal 20 Agustus 2018.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk Mendeskripsikan pelaksanaan sewa barang pecah belah di dusun Widoro Kandang, Laban, Kecamatan Mojolaban-Sukoharjo tersebut telah sesuai dengan peraturan akad sewa dalam fatwa Dewan Syariah Nasional atau belum.

Perjanjian sewa menyewa dalam Islam disebut *Ijarah*, yaitu akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.³ Secara lafal, *Al-ijarah* berasal dari kata “*al-ajru*” yang berarti “*al-iwad*” (ganti) dan oleh sebab itu “*ath-thawab*” atau (pahala) dinamakan *ajru*.⁴

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijarah* diatur dalam Al-Quan, Sunnah dan ijtihad.

Firman Allah, QS. Al-Qashash [28]: 26:

فَالْتِ إِحْدَاهُمَا يَأْبَتِ اسْتَأْجَرَهُ، إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

“Salah seorang dari kedua perempuan itu berkata, ‘Hai ayahku! Ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.’”

Hadis riwayat ‘Abd ar-Razzaq dari Abu Hurayrah dan Abu Sa’id al-Khudriy, Nabi SAW bersabda:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ

“Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya.”

Ijma’: Para ulama tentang kebolehan melakukan akad sewa-menyewa.

Kaidah Fiqh:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 114.

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 13*, (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2006), hal. 203.

“Menghindarkan mafsadat (kerusakan, bahaya) harus didahulukan atas mendatangkan kemaslahatan”

Fatwa Dewan Syariah Nasional, hukum tentang *Ijarah* ialah akad sewa menyewa untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut: *Sighat ijarah* yaitu, ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak, baik secara verbal atau dalam bentuk lain. Pihak-pihak yang berakad terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa. Objek akad *ijarah*: manfaat barang dan sewa, atau manfaat jasa dan upah. Objek *ijarah* adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa. Manfaat barang harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak. Pemenuhan manfaat harus bersifat dibolehkan. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan *jahalah* (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik. Sewa adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa dalam *ijarah*. Pembayaran sewa boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan objek kontrak. Kelenturan (*fexibility*) dalam menentukan sewa dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.

2. METODE

Jenis penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu meneliti langsung ke lapangan pada masalah yang akan diteliti.⁵ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Lexy J. Moleong penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan

⁵Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, cet. ke-2, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 14.

data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁶

Penelitian ini berlokasi di Dusun Widoro Kandang Rt 02 Rw 04 Laban Kecamatan Mojolaban, Sukoharjo, adapun yang menjadi subjek penelitian adalah persewaan barang pecah belah dusun Widoro Kandang. Subjek penelitiannya adalah sumber tempat peneliti memperoleh keterangan penelitian.⁷

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wawancara (*interview*). Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden).⁸ Analisis data dapat dilakukan dua cara, yakni berpikir induktif dan deduktif. Namun dalam penelitian ini cara yang digunakan adalah dengan cara berpikir deduktif. Cara berpikir deduktif adalah proses analisa berangkat dari persoalan pengetahuan umum atau fakta yang bersifat umum untuk menemukan kesimpulan yang bersifat khusus. Sedangkan cara berpikir induktif adalah proses analisis dari persoalan pengetahuan khusus atau fakta yang bersifat khusus untuk kesimpulan yang bersifat umum.⁹

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Di dusun Widoro Kandang, Laban, Mojolaban-Sukoharjo pada persewaan barang pecah belah cenderung menggunakan model sighthat akad secara lisan. Hal ini terlihat ketika transaksi berlangsung, yakni antara penyewa dan yang menyewakan dalam melakukan transaksi perjanjian dilakukan secara lisan, yaitu dengan cara datang langsung ke tempat penyewaan (orang yang menyewakan).

Analisis dari segi akad, pelaksanaan ijarah yang dilakukan oleh penyewa dan yang menyewakan sudah sesuai dengan rukun dan syarat ijarah secara syara'. a). Dua

⁶Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2000), hal. 3.

⁷*Ibid*, hal. 92.

⁸Rianto Adi, *Metodelogi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), hal. 72.

⁹Jujun S. Suriasumantri. *Filsafat Ilmu, Sebuah Pengetahuan Populer*. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003), hal. 46.

orang yang bertransaksi, yang menyewakan (*mua'jir*) dan penyewa (*musta'jir*), b). Shigat (lafadz ijab dan kabul), c). Adanya manfaat, d). Upah (*ujrah*).¹⁰

Analisis dari segi *Ijarah* (sewa-menyewa), akad sewa menyewa barang pecah belah yang terjadi di dusun Widoro Kandang kelurahan Laban kecamatan Mojolaban kabupaten Sukoharjo sah menurut rukun dan syarat sesuai dengan hukum syara'.

Analisis dari segi fatwa Dewan Syariah Nasional, praktik sewa menyewa barang pecah belah di dusun Widoro Kandang kelurahan Laban kecamatan Mojolaban kabupaten Sukoharjo dari hasil penelitian penulis bahwa praktik sewa menyewa yang terjadi yaitu telah sesuai dengan ketentuan rukun dan syarat hukum syara'. Pelaksanaan akad dan transaksi disetujui oleh kedua belah pihak baik dari segi pemilihan barang, lamanya waktu sewa hingga upah yang harus dipenuhi oleh pihak penyewa.

Dari analisis tersebut, dapat dikatakan bahwa praktik sewa menyewa barang pecah belah pada masyarakat di paguyuban dusun Widoro Kandang kelurahan Laban kecamatan Mojolaban kabupaten Sukoharjo dalam pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, serta sesuai dan memenuhi syarat serta rukun dalam fatwa Dewan Syariah Nasional. Maka akad sewa barang pecah belah di paguyuban dusun Widoro Kandang kelurahan Laban kecamatan Mojolaban kabupaten Sukoharjo menurut fatwa Dewan Syariah Nasional adalah sah atau diperbolehkan.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Mekanisme akad sewa menyewa barang pecah belah di dusun Widoro Kandang telah memenuhi unsur-unsur sewa menyewa baik dari segi rukun maupun syarat yang sesuai dengan hukum syara', karena dalam pelaksanaan akad terjadi kesepakatan, jelas tempo sewanya dan kesepakatan harga. Tetapi dalam pelaksanaannya ada hal yang perlu digaris bawahi, yaitu akad yang dilakukan hanya sebatas lisan sehingga

¹⁰Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), hal. 148.

dikhawatirkan memunculkan problematika baru dalam transaksi walaupun hal tersebut tidak dilarang oleh hukum syara'. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa transaksi sewa menyewa barang pecah belah tidak ada kesalahan dalam pengaplikasiannya.

Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) terhadap akad sewa menyewa barang pecah belah pada masyarakat dusun Widoro Kandang kelurahan Laban kecamatan Mojolaban kabupaten Sukoharjo ini sah, karena penyewa dan yang menyewakan barang saling sepakat dalam akad, jelas manfaat barang yang disewakan, tempo penyewaan dan biaya sewa dibayar sesuai kesepakatan. Dengan demikian transaksi ini saling menguntungkan antara penyewa dan yang menyewakan.

4.2 Saran

Praktik sewa menyewa di paguyuban dusun Widoro Kandang kelurahan Laban kecamatan Mojolaban kabupaten Sukoharjo ini pada dasarnya sudah sesuai dengan hukum syara' baik rukun maupun syaratnya. Tetapi akan lebih baik jika akad tidak hanya dilakukan lisan tetapi perlu juga dengan tertulis agar memiliki kekuatan hukum lebih kuat. Dalam hal ini penulis tentu mempunyai keterbatasan kemampuan dalam melaksanakan penelitian ini sebagai tugas akhir, kekurangan dan kesalahan pasti ada, maka untuk memperbaiki hal ini penulis mengharapkan kritik dan saran agar menjadi lebih baik lagi kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Rianto. 2004. *Metodelogi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit.
- Basyir, Ahmad Azhar. 2000. *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press.
- Ghafur Anshari, Abdul. 2008. *Reksa Dana Syariah*. Bandung: Refika Aditama.
- Ghazaly, Abdul Rahman. Ghufon Ihsan dan Sapiudin Shidiq. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Hasil Wawancara dengan bapak Memet Haryanto pengurus persewaan barang pecah belah di dusun Widoro Kandang pada tanggal 20 Agustus 2018.

- Majelis Ulama Indonesia. 2014. *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Indonesia MUI*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Moleong, Lexy J. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- S. Suriasumantri, Jujun. 2003. *Filsafat Ilmu, Sebuah Pengetahuan Populer*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Sabiq, Sayyid. 2006. *Fiqh Sunnah 13*. Jakarta : Pena Pundi Aksara.
- Suhendi, Hendi. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Teguh, Muhammad. 2001. *Metode Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, cet. ke-2. Jakarta: Raja Grafindo Persada.